



KOLABORASI DISKOMINFOSAN DAN DINDUKCAPIL

## Sistem Data Terintegrasi, Intervensi Kebijakan Semakin Taktis

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya kini memiliki sistem data terintegrasi yang menggabungkan data sektoral dengan data kependudukan untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti dan wilayah. Sistem yang dinamai GeoTaktis tersebut merupakan inovasi dalam mengembangkan tata kelola data pembangunan yang lebih akurat, dinamis, dan berdaya guna.

Sistem ini dikembangkan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah di bawah koordinasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) selaku walidata Kota Yogya, serta dimoderatori oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil).

Walikota Yogya Hasto Wardoyo, menegaskan pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan data secara tepat dan berkelanjutan agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang akurat di tingkat pemerintah maupun masyarakat. "Kalau saya sebagai dokter, data itu sama seperti diagnosis sedang program itu sama dengan terapi. Kalau data saja tidak punya apalagi data realtime tidak ada, itu sama seperti dokter yang tidak

tahu diagnosis pasiennya. Bagaimana mau mengobati," ujarnya, Selasa (7/10).

Melalui data geospasial yang kini dikembangkan, Hasto menilai Pemkot Yogya telah selangkah lebih maju. Ia menyebut, role data yang sudah dimiliki saat ini tergolong bagus dan perlu terus dilatih agar semakin terampil dalam menginterpretasikan dan meng-overlay data dari berbagai sumber. "Datanya sudah bagus, hanya saja mereka perlu dilatih agar bisa menjelaskannya dengan sederhana. Saya miris nanti bisa divisualisasikan dalam bentuk gambar, misalnya potret satelit yang menunjukkan gambar rumah-rumah. Setiap rumah bisa diklik, lalu muncul datanya nama kepala keluarga, alamat, dan keterangan lainnya," ungkap-

nya. Dirinya mencontohkan pemanfaatan data tersebut dalam program penanganan stunting. Data anak stunting dapat di-overlay dengan data kondisi rumah, jamban, atau tingkat kesejahteraan keluarga, sehingga dapat diketahui secara spesifik intervensi yang dibutuhkan. "Misalnya dari 90 anak stunting, ternyata ada lima keluarga yang belum punya jamban sehat. Maka fokusnya kita ke lima keluarga itu dulu. Jadi jelas, terarah, dan cepat," imbuhnya.

Hasto juga menekankan pentingnya menjaga validitas data agar selalu hidup dan tidak sekadar menjadi arsip yang tidak dimanfaatkan. Menurutnya, kesalahan dalam menafsirkan data bisa berakibat fatal, sehingga perlu kehati-hatian dalam membaca dan mengolah data. Oleh karena itu dirinya juga mendorong para pengelola data di setiap perangkat daerah untuk terus berlatih meng-overlay antar variabel agar analisis bisa dilakukan cepat dan efisien.

Kepala Dindukcapil Kota Yogya Septi Sri Rejeki, menjelaskan GeoTaktis merupakan

salah satu inovasi dalam platform BIJAK (Business Intelligent untuk Kebijakan Kota Yogya) yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data spasial dan kependudukan. Aplikasi ini dapat diakses melalui laman <https://bijak.jogjakota.go.id>. "Melalui sistem ini, data sektoral di-overlay dengan data kependudukan yang terdiri dari data penduduk dan data keluarga, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif untuk perencanaan dan pengambilan keputusan," terangnya.

Data dari berbagai sektor diolah menjadi wawasan taktis yang dapat dimanfaatkan untuk identifikasi, analisis, serta pengambilan kebijakan secara lebih efisien dan tepat sasaran. Kemudian menampilkan data penduduk berisiko dalam bentuk peta spasial hingga ke tingkat kemantren, kelurahan, RT/RW, bahkan titik koordinat individu, lengkap dengan data agregat untuk analisis makro. Selain data agregat, sistem Geotaktis juga menyediakan data By Name By Address atau BNBA, yang hanya dapat diakses oleh pimpinan untuk kebutuhan peng-

ambilan keputusan strategis.

Septi menambahkan, pengembangan Geotaktis merupakan hasil kolaborasi lintas sektor dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kolaborasi tersebut melibatkan Bappeda, DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DLH, serta BKAD.

Sementara itu, Kepala Diskominfosan Kota Yogya Trihastono, menegaskan pemanfaatan data tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi. Karena bersinggungan dengan regulasi informasi publik, setiap sektor yang mengakses atau menggunakan data wajib memiliki perjanjian kerja sama dan non-disclosure agreement (NDA) untuk menjamin akuntabilitas pemanfaatannya. "Dengan demikian, jelas siapa yang memanfaatkan data dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaannya. Tiga aspek penting dalam digitalisasi data ini adalah integrasi data, perlindungan data pribadi, dan akuntabilitas pemanfaatan data," tandasnya. **(Dhi-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			

Yogyakarta, 27 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005